

Volume 16. No. 1. Oktober 2019

ISSN: 1412-825X

Jurnal ADMINISTRASI PUBLIK

**Diterbitkan Oleh:
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FISIP - UNIVERSITAS NUSA CENDANA
KUPANG - NTT**

JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK

VOLUME 16, NOMOR 1 OKTOBER 2019

DAFTAR ISI

ANALISIS BEBAN KERJA PEGAWAI PADA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS NUSA CENDANA Dewi Apriani Adi, Jacob Wadu, dan Rikhardus Seran Klau	1 - 34
PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA KUPANG DALAM MENGELOLA PARIWISATA LAUT Hendrik Toda	35 - 50
ORGANISASI PEMERINTAH YANG BERBASIS KINERJA Marthina Raga Lay	51 - 60
DESENTRALISASI DAN PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA Maria M. Lino dan Jeni J. Therik	61 - 72
RELASI BUDAYA DAN KEPEMIMPINAN, EKOLOGI ETNIS ATONIPAH METO DI PULAU TIMOR, MARAPU DI PULAU SUMBA Lenny Magdalena Tamunu	73 - 86
PERANAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) TERHADAP PERLINDUNGAN PEKERJA ANAK DI NTT Adriana R. Fallo	87 - 96

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA KUPANG DALAM MENGELOLA PARIWISATA LAUT

Hendrik Toda¹

ABSTRAK

Pariwisata merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia terutama menyangkut kegiatan sosial dan ekonomi. Pariwisata NTT, menurut data BPS 2018 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik di NTT terbanyak pada Kota Kupang sebanyak 260.551 orang. Tahun 2017 sedikitnya ada 13.000 wisatawan mancanegara (Wisman) berkunjung ke Kota Kupang dengan tujuan berbisnis dan kegiatan pemerintahan. Jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Kupang dalam tahun 2017 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan arus kunjungan wisatawan pada 2016 yang hanya mencapai 197.632 orang.

Penelitian ini ingin mengetahui persepsi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah Kota Kupang dalam mengelola pariwisata laut dilihat dari faktor internal dan faktor eksternal. Hasil penelitian menunjukan lemahnya pengelolaan pariwisata terletak pada SDM pegawai negeri yang sangat terbatas sehingga tidak mampu mengelola setiap potensi dengan baik pada akhirnya banyak masyarakat yang mengeluh terhadap kinerja Dinas Pariwisata Kota Kupang yang sangat rendah. Bahkan tidak serius dan tidak mempunyai program yang jelas dalam mengelola pariwisata akibatnya semua tempat pariwisata di Kota Kupang tidak mencerminkan pariwisata yang layak di kunjungi. Faktor eksternal terlihat belum adanya kolaborasi antara pemerintah dan swasta mengelola pariwisata mengakibatkan kondisi pariwisata tidak dikelola dengan baik.

Kata Kunci : Persepsi, Kebijakan, Pariwisata

PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia terutama menyangkut kegiatan sosial dan ekonomi. Diawali dari kegiatan yang semula hanya dinikmati oleh segelintir orang-orang yang relatif kaya pada awal abad ke-20, kini telah menjadi bagian dari hak azasi manusia. Hal ini terjadi tidak hanya di negara maju tetapi mulai dirasakan pula di negara berkembang. Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang dalam tahap pembangunannya, berusaha membangun industri pariwisata sebagai salah satu cara untuk mencapai

neraca perdagangan luar negeri yang berimbang. Melalui industri ini diharapkan pemasukan devisa dapat bertambah (Pendit, 2002).

Sebagaimana diketahui bahwa sektor pariwisata di Indonesia masih mempunyai peranan yang sangat penting dalam menunjang pembangunan nasional sekaligus merupakan salah satu faktor yang sangat strategis untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan devisa negara. Pariwisata lebih populer dan banyak dipergunakan dibanding dengan terjemahan yang seharusnya dari istilah *tourism*, yaitu turisme, Terjemahan yang seharusnya dari *tourism* adalah wisata. Yayasan Alam Initra Indonesia (1995)

¹Penulis adalah Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Nusa Cendana email.hendrik.toda2012@gmail.com

membuat terjemahan *tourism* dengan turisme. Di dalam tulisan ini dipergunakan istilah pariwisata yang banyak digunakan oleh para rimbawan, mempergunakan istilah pariwisata untuk menggambarkan adanya bentuk wisata yang baru muncul pada dekade delapan puluhan. Salah satu sumber daya wisata yang berkembang di Indonesia adalah wisata pantai dan lautan atau yang biasa disebut pariwisata bahari. Hal ini disebabkan oleh karena Indonesia merupakan negara kepulauan dan memiliki potensi sumber daya pesisir dan lautan yang besar. Haris dan Godwin, 2002 (dalam Juliana dkk, 2013). Sumber daya ini berupa populasi ikan hias, terumbu karang, padang lamun, hutan mangrove dan berbagai bentangan pasiryang unik. Sumber daya alam pesisir merupakan salah satu sumber daya alam yang terdapat di Indonesia dan memiliki potensi tinggi untuk dikembangkan sebagai daya tarik wisata.

Kepariwisataan merupakan subjek yang bersifat multidisiplin dan multidimensi tetapi masih kurang mendapat perhatian dari para perencana yang telah disibukkan dengan berbagai permasalahan ketataruangan sektor lain yang dipandang lebih konkret. Pada berbagai rencana kota /wilayah, ruang pariwisata tidak muncul secara khusus sehingga perencanaan pembangunan dan pengelolaan wilayah perlu memperhatikan hal ini (Irwan, Pabiban 2013)

Pariwisata NTT, dalam pengembangannya mulai mendapat dukungan dari pemerintah ,seperti adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2015, di mana Kupang termasuk dalam Destinasi Pariwisata Nasional(DPN) Kupang. Menurut data BPS 2018 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik di NTT terbanyak pada kota kupang sebanyak 260.551 orang menurut kabupaten dan kota dapat dilihat pada tabel 1.1

Wilayah	Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Domestik (Juta)							
	Domestik							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Sumba Barat	18.946	4.941	6.026	3.952	2.456	3.897	3.766	3.556
Sumba Timur	13.350	5.808	6.334	6.900	4.389	10.908	13.305	13.883
Kupang	116	1.645	-	-	1.763	1.782	1.846	366
Timor Tengah Selatan	20.744	8.323	16.733	7.554	11.690	11.268	11.623	11.717
Timor Tengah Utara	4.853	4.274	10.399	3.697	5.624	4.543	6.065	6.758
Belu	21.776	17.626	17.331	17.385	16.369	17.792	21.999	24.445
Alor	1.574	3.317	2.656	3.716	1.670	2.743	3.289	4.651
Lembata	13.809	3.444	3.768	1.311	3.439	1.683	2.097	6.796
Flores Timur	18.374	11.664	14.970	15.074	20.063	19.626	21.154	20.356
Malaka	18.395	20.723	20.774	18.712	17.643	17.698	29.029	36.173
Ende	24.120	20.472	24.658	20.130	19.297	23.354	22.638	22.713
Ngada	10.343	5.396	7.906	3.860	5.480	14.475	1.617	4.313
Manggarai	18.359	10.686	12.077	10.711	15.683	16.816	13.034	11.660
Kota Melak	3.488	896	2.104	309	384	668	677	122
Manggarai Barat	28.386	20.246	22.391	15.296	18.504	37.407	54.758	76.645

Sumba Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumba Barat Daya	-	-	-	108	2.182	5.004	4.705	5.164
Ngakha	-	4.722	5.612	1.893	1.076	7.292	7.361	7.250
Manggarai Timur	596	1.600	1.971	2.691	1.573	2.244	1.638	1.766
Suku Rutan	-	-	1.086	147	1.032	1.731	1.368	1.215
Malaka	-	-	-	-	-	-	-	1.999
Kota Kupang	261.376	337.629	355.992	379.838	449.914	444.975	301.449	280.631
Nusa Tenggara Timur	498.924	282.506	338.472	318.658	331.604	574.456	430.382	523.083

Kota Kupang merupakan salah satu ibu kota yang juga sebagai kota utama di Timor Barat. Walaupun Kupang merupakan kota kecil namun memiliki suasana yang sibuk dan lalu lintas di pusat kota yang ramai namun agak semrawut seperti umumnya kota maju lainnya di Indonesia. Terdapat beberapa obyek wisata baik wisata alam, wisata bahari, maupun wisata budaya di Kota Kupang, sebagai contoh Pantai Lasiana, Situs Taebenu, dan Taman Kota air terjun Oenesu maupun wisata budaya seperti Rumah Raja Kupang. Keanekaragaman budaya tersebut dapat menjadi obyek pariwisata untuk menarik pengunjung dari mancanegara maupun domestik.

Pengembangan pariwisata merupakan salah satu usaha untuk mempromosikan daya tarik suatu objek wisata agar menjadi berkembang sesuai dengan visi dan misi. Pengembangan pariwisata hendaknya tidak terlepas dari arah pengembangan kebudayaan nasional Indonesia. Pada umumnya masyarakat yang merasakan dan melihat pengembangan pariwisata yang ada di daerahnya, namun tidak semua pendapat masyarakat mengatakan baik atau buruk pengembangan pariwisata, karena setiap individu memiliki persepsi atau pandangan yang berbeda.

Tahun 2017 sedikitnya ada 13.000 wisatawan mancanegara (Wisman) berkunjung ke Kota Kupang dengan tujuan berbisnis dan kegiatan pemerintahan. Menurut Kepala Dinas Pariwisata Kota Kupang kunjungan wisatawan ke Kota Kupang dalam tahun 2017 mengalami

peningkatan. Sementara, arus kunjungan wisatawan mancanegara juga mengalami kenaikan sekalipun Kota Kupang tidak memiliki banyak destinasi wisata. Jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Kota Kupang juga mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan arus kunjungan pada 2016 yang hanya mencapai 6.500 orang. Ia mengatakan, selama berada di Kupang para wisatawan dari berbagai negara seperti Australia, Eropa itu mendatangi beberapa lokasi wisata alam di Kota Kupang seperti Pantai Lasiana serta gua-gua alam peninggalan Jepang <https://www.victorynews.id/kunjungan-wisman-ke-kota-kupang-13-000-orang>. Diunduh 03/06/2019).

Namun demikian meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan selalu menemui berbagai persoalan terkait pariwisata di Kota Kupang dapat di tunjukan lewat wawancara dan observasi yang dilakukan penulis dengan masyarakat yang berwisata di beberapa pantai seperti Pantai Lasiana, Pantai Manikin dan Pantai Tablolong mengeluhkan bahwa pemerintah kurang memperhatikan objek wisata seperti kebersihan karena banyak pengunjung yang suka membuang sampah sembarangan di pinggir pantai dan tidak ada tindakan sehingga masyarakat tetap mengulang-ulang kesalahan yang sama, bahkan ada pendapat lain bahwa pariwisata di kota kupang pada umumnya tidak dikelola dengan baik sehingga kondisi pantai tidak terurus, tidak dikelola dengan baik seperti fasilitas umum seperti tempat bermain anak, kamar mandi tempat parkir dll,

bahkan ada beberapa pengunjung mengeluhkan tidak aman untuk berenang di pantai karena pemerintah tidak dapat berbuat apa-apa dengan keberadaan reptil buaya di sekitar pantai yang ada di kota kupang.

Kondisi demikian perlu dilakukan upaya oleh pemerintah kota lewat Dinas Pariwisata untuk mengelola pariwisata dengan baik agar dapat memberikan kenyamanan bagi pengunjung. Hal ini tentunya tidak terlepas dari kesaadaraan masyarakat sebagai bagian dari kebijakan pemerintah dan mengelola pariwisata di kota kupang agar memiliki kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan pantai dengan demikian akan memberikan kenyamanan bagi masyarakat kota kupang sendiri dan wisatawan domestik bahkan mancanegara.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas maka penelitian yang telah dilakukan ini adalah dengan judul Bagaimana Persepsi Masyarakat Terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Kupang Dalam Mengelola Pariwisata Laut.

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR

a. Konsep Persepsi

Persepsi merupakan salah satu aspek psikologis yang penting bagi manusia dalam merespon kehadiran berbagai aspek dan gejala di sekitarnya. Persepsi mengandung pengertian yang sangat luas, menyangkut *intern* dan *ekstern*. Berbagai ahli telah memberikan definisi yang beragam tentang persepsi, walaupun pada prinsipnya mengandung makna yang sama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu. Proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya.

Setiap orang mempunyai kecenderungan dalam melihat benda yang sama dengan cara yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut bisa dipengaruhi oleh banyak faktor, di antaranya adalah

pengetahuan, pengalaman dan sudut pandangnya. Persepsi juga bertautan dengan cara pandang seseorang terhadap suatu objek tertentu dengan cara yang berbeda-beda dengan menggunakan alat indera yang dimiliki, kemudian berusaha untuk menafsirkannya. Persepsi baik positif maupun negatif ibarat *file* yang sudah tersimpan rapi di dalam alam pikiran bawah sadar kita. *File* itu akan segera muncul ketika ada stimulus yang memicunya, ada kejadian yang membukanya. Persepsi merupakan hasil kerja otak dalam memahami atau menilai suatu hal yang terjadi di sekitarnya (Waidi, 2006: 118).

Sugihartono, dkk (2007:8) mengemukakan bahwa persepsi adalah kemampuan otak dalam menerjemahkan stimulus atau proses untuk menerjemahkan stimulus yang masuk ke dalam alat indera manusia. Persepsi manusia terdapat perbedaan sudut pandang dalam penginderaan. Adayang mempersepsikan sesuatu itu baik atau persepsi yang positif maupun persepsi negatif yang akan mempengaruhi tindakan manusia yang tampak atau nyata.

Menurut Miftah Toha (2003:154), faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang adalah sebagai berikut:

- a. Faktor internal: perasaan, sikap dan kepribadian individu, prasangka, keinginan atau harapan, perhatian (fokus), proses belajar, keadaan fisik, gangguan kejiwaan, nilai dan kebutuhan juga minat, dan motivasi.
- b. Faktor eksternal: latar belakang keluarga, informasi yang diperoleh, pengetahuan dan kebutuhan sekitar, intensitas, ukuran, keberlawanan, pengulangan gerak, hal-hal baru dan familiar atau ketidakasingan suatu objek.

Walgito (2004:70) mengungkapkan bahwa persepsi merupakan suatu proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang diterima oleh organisme atau individu sehingga menjadi sesuatu yang berarti, dan

merupakan aktivitas yang *integrated* dalam diri individu. Respon sebagai akibat dari persepsi dapat diambil oleh individu dengan berbagai macam bentuk. Stimulus mana yang akan mendapatkan respon dari individu tergantung pada perhatian individu yang bersangkutan. Berdasarkan hal tersebut, perasaan, kemampuan berfikir, pengalaman-pengalaman yang dimiliki individu tidak sama, maka dalam mempersepsi sesuatu stimulus, hasil persepsi mungkin akan berbeda antar individu satu dengan individu lain.

Sekarang kita juga akan mengetahui beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi menurut Vincent (Manajemen Bisnis Total, 1997: Hal 35):

1. Pengalaman masa lalu (terdahulu) dapat mempengaruhi seseorang karena manusia biasanya akan menarik kesimpulan yang sama dengan apa yang ia lihat, dengar, dan rasakan. Keinginan dapat mempengaruhi persepsi seseorang dalam hal membuat keputusan. Manusia cenderung menolak tawaran yang tidak sesuai dengan apa yang ia harapkan.
2. Pengalaman dari teman-teman, di mana mereka akan menceritakan pengalaman yang telah dialaminya. Hal ini jelas mempengaruhi persepsi seseorang.

Persepsi pada masing-masing individu memiliki kecenderungan berbeda satu dengan yang lainnya. Pareek (1984: 13) mengemukakan ada 4 (empat) faktor utama yang menyebabkan terjadinya perbedaan persepsi, yaitu : 1. Perhatian Terjadinya persepsi pertama kali diawali oleh adanya perhatian. Tidak semua stimulus yang ada di sekitar dapat ditangkap semuanya secara bersamaan. Perhatian biasanya hanya tertuju pada satu atau dua objek yang menarik bagi kita. 2. Kebutuhan Setiap orang mempunyai kebutuhan yang harus dipenuhi, baik itu kebutuhan yang sifatnya menetap maupun kebutuhan yang sifatnya hanya sesaat, di mana masing-masing orang

memiliki kebutuhan yang tidak sama antara satu dengan yang lainnya. 3. Kesiapan Kesiapan adalah harapan seseorang terhadap suatu stimulus yang muncul, agar memberikan reaksi terhadap stimulus yang diterima lebih efisien sehingga akan lebih baik apabila orang tersebut telah siap terlebih dahulu. 4. Sistem Nilai. Sistem nilai yang berlaku dalam diri seseorang atau masyarakat akan berpengaruh terhadap persepsi seseorang.

Setiap orang mempunyai kecenderungan dalam melihat benda yang sama dengan cara yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut bisa dipengaruhi oleh banyak faktor, di antaranya adalah pengetahuan, pengalaman dan sudut pandangnya. Persepsi juga bertautan dengan cara pandang seseorang terhadap suatu objek tertentu dengan cara yang berbeda-beda dengan menggunakan alat indera yang dimiliki, kemudian berusaha untuk menafsirkannya. Persepsi baik positif maupun negatif ibarat *file* yang sudah tersimpan rapi di dalam alam pikiran bawah sadar kita. *File* itu akan segera muncul ketika ada stimulus yang memicunya, ada kejadian yang membukanya. Persepsi merupakan hasil kerja otak dalam memahami atau menilai suatu hal yang terjadi di sekitarnya (Waidi, 2006: 118).

Rakhmat (2007: 51) menyatakan persepsi adalah pengamatan tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Sedangkan, Suharman (2005:23) menyatakan: "persepsi merupakan suatu proses menginterpretasikan atau menafsir informasi yang diperoleh melalui sistem alat indera manusia". Menurutnya ada tiga aspek di dalam persepsi yang dianggap relevan dengan kognisi manusia, yaitu pencatatan indera, pengenalan pola, dan perhatian.

Dari penjelasan di atas dapat ditarik suatu kesamaan pendapat bahwa persepsi merupakan suatu proses yang dimulai dari penglihatan hingga terbentuk tanggapan yang terjadi dalam diri individu sehingga individu sadar akan segala sesuatu dalam

lingkungannya melalui indera-indera yang dimilikinya.

b. Konsep Kebijakan Publik

Pengertian kebijakan publik lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Di samping itu dilihat dari hirarkinya kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota

Secara terminologi pengertian kebijakan publik (*public policy*) itu ternyata banyak sekali, tergantung dari sudut mana kita mengartikannya. Easton memberikan definisi kebijakan publik sebagai *the authoritative allocation of values for the whole society* atau sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. Laswell dan Kaplan juga mengartikan kebijakan publik sebagai a projected program of goal, value, and practice atau sesuatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktek-praktek yang terarah. Pressman dan Widavsky sebagaimana dikutip Winarno (2002:17) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bias diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta. Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah. Robert Eyestone sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008:6) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya”. Banyak pihak beranggapan

bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal.

c. Konsep Pariwisata

Eksistensi industri pariwisata di negara-negara yang telah berkembang dan maju perekonomiannya tidaklah terjadi begitu saja tanpa adanya sejarah pertumbuhannya dimasa lampau. Hal ini dapat dilihat dari permulaan adanya gejala-gejala bergeraknya orang-orang dari satu tempat ke tempat lain, dari satu daerah ke daerah lain di negara tersebut, di mana orang-orang itu disibukkan dengan adanya kegiatan-kegiatan baru di berbagai tempat, kota atau daerah di negeri itu sendiri atau negeri-negeri tetangga yang berdekatan. Institute Of Tourism In Britain (sekarang Tourism Society in Britain) di tahun 1976 merumuskan: “Pariwisata adalah kepergian orang-orang sementara dalam jangka waktu pendek ke tempat-tempat tujuan di luar tempat tinggal dan bekerja sehari harinya serta kegiatan-kegiatan mereka selama berada di tempat-tempat tujuan tersebut; ini mencakup kepergian untuk berbagai maksud, termasuk kunjungan seharian atau darmawisata/ ekskursi” (Nyoman S. Pendit, 1999).

Pengertian pariwisata secara umum merupakan suatu perjalanan yang dilakukan seseorang untuk sementara waktu yang diselenggarakan dari suatu tempat ketempat yang lain dengan meninggalkan tempat semula dan dengan suatu perencanaan atau bukan maksud untuk mencari nafkah ditempat yang dikunjunginya, tetapi semata-mata untuk menikmati kegiatan pertamasyaan atau rekreasi untuk memenuhi keinginan yang beranekaragam.

Badrudin (2001) mendefinisikan pariwisata sebagai perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain, bersifat sementara, dilakukan

perorangan maupun kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian atau kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam dan ilmu. Mathieson dan Wall (1982) mendefinisikan pariwisata sebagai serangkaian aktivitas berupa aktivitas perpindahan orang untuk sementara waktu ke suatu tujuan di luar tempat tinggal maupun tempat kerjanya yang biasa, aktivitas yang dilakukannya selama tinggal di tempat tujuan tersebut, dan kemudahan-kemudahan yang disediakan untuk memenuhi kebutuhannya baik selama dalam perjalanan maupun di lokasi tujuannya. Sedangkan batasan pariwisata yang diberikan oleh Yoeti (2008) adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu, yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud bukan untuk berusaha atau mencari nafkah di tempat yang dikunjungi, tetapi semata-mata untuk menikmati perjalanan tersebut guna bertamasya dan rekreasi atau untuk memenuhi keinginan yang beranekaragam di luar mencari nafkah.

World Tourism Organization (WTO) mendefinisikan pariwisata sebagai suatu aktivitas perjalanan ke suatu tempat dan tinggal di luar lingkungan mereka sehari-hari tidak lebih dari setahun dan bertujuan untuk istirahat atau bersenang-senang, bisnis, dan tujuan lainnya yang tidak terkait dengan aktivitasnya sehari-hari selama mereka berada di daerah tujuan wisata.

Pengertian pariwisata yang lebih menekankan pada aspek ekonomi dapat dilihat dalam definisi yang dibuat oleh Wahab (1976), yaitu pariwisata adalah salah satu jenis industri baru yang mampu menyediakan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam penyediaan kesempatan kerja, pendapatan, taraf hidup serta menstimulasi sektor-sektor

lain di daerah yang menerima wisatawan. Ia memandang pariwisata sebagai suatu sektor yang kompleks karena meliputi industri-industri dalam arti yang klasik seperti industri kerajinan dan cinderamata, penginapan, transportasi dan lain-lain.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut maka penulis dapat memberikan pengertian pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu dari satu tempat ke tempat lain yang mempunyai obyek dan daya tarik wisata untuk dapat dinikmati sebagai suatu rekreasi atau hiburan yang mendapatkan kepuasan lahir dan batin.

Pengembangan obyek wisata alam sangat erat kaitannya dengan peningkatan produktivitas sumber daya alam dalam konteks pembangunan ekonomi, sehingga selalu dihadapkan pada kondisi interaksi berbagai kepentingan yang melibatkan aspek kawasan hutan, pemerintah daerah, aspek masyarakat, dan pihak swasta di dalam suatu sistem tata ruang wilayah. Kendala pengembangan obyek wisata alam berkaitan erat dengan: (a) Instrumen kebijakan dalam pemanfaatan dan pengembangan fungsi kawasan untuk mendukung potensi obyek wisata alam; (b) Efektivitas fungsi dan peran obyek wisata alam ditinjau dari aspek koordinasi instansi terkait; (c) Kapasitas institusi dan kemampuan SDM dalam pengelolaan obyek wisata alam di kawasan hutan; dan (d) Mekanisme peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata alam.

Menurut Marpaung (2002) perkembangan kepariwisataan bertujuan memberikan keuntungan baik bagi wisatawan maupun warga setempat. Pariwisata dapat memberikan kehidupan yang standar kepada warga setempat melalui keuntungan ekonomi yang didapat dari tempat

tujuan wisata. Dalam perkembangan infrastruktur dan fasilitas rekreasi, keduanya menguntungkan wisatawan dan warga setempat, sebaliknya kepariwisataan dikembangkan melalui penyediaan tempat tujuan wisata. Hal tersebut dilakukan melalui pemeliharaan kebudayaan, sejarah dan taraf perkembangan ekonomi dan suatu tempat tujuan wisata yang masuk dalam pendapatan untuk wisatawan akibatnya akan menjadikan pengalaman yang unik dari tempat wisata. Pada waktu yang sama, ada nilai-nilai yang membawa serta dalam perkembangan kepariwisataan. Sesuai dengan panduan, maka perkembangan pariwisata dapat memperbesar keuntungan sambil memperkecil masalah-masalah yang ada.

METODE PENELITIAN

a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dengan metode deskriptif. Menurut Creswell (2010:4) penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk memahami makna yang oleh sejumlah individu atau kelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.

b. Fokus Penelitian dan Defini Operasional

Yang menjadi fokus penelitian ini adalah Kebijakan terkait peningkatan penerangan jalan kelurahan di kota kupang

Definisi operasional Miftah Toha (2003:154), ada dua faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang terhadap keberadaan pariwisata di kota kupang adalah sebagai berikut:

1. Faktor internal yang dimaksud disini sejauhmana kemampuan aparatur pemerintah daerah dalam mengelola pariwisata, apakah pemda serius dalam

mengelola pariwisata, bagaimana peluang pengembangan pariwisata terhadap peningkatan PAD kota kupang.

2. Faktor eksternal: dukungan masyarakat dalam menjaga kebersihan tempat wisata, kolaborasi antara pemerintah dengan swasta dalam pengelolaan pariwisata, lingkungan sekitar yang mendukung.

c. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data

Terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kualitas data hasil penelitian, yaitu kualitas instrumen penelitian dan kualitas pengumpulan data. Dalam telaah ini instrumen penelitian yang utama adalah sipeneliti sendiri sehingga sebelum turun ke lapangan, peneliti perlu membekali diri dengan pemahaman konsep, teori dan wawasan yang luas terhadap topik yang ditelaah. Selain itu akan dikembangkan kerangka kerja penelitian yang berfungsi sebagai arah dalam pelaksanaan penelitian. Selain instrumen, maka teknik pengumpulan data juga sangat penting dalam menentukan keberhasilan telaahan. Dan menuntut adanya keterlibatan antara peneliti dan responden sehingga mampu mengangkat berbagai data dan informasi yang sebelumnya kurang terlihat. Metode pengumpulan data secara sistematis juga mengumpulkan data yang didapatkan selama proses kegiatan berjalan. Data yang didapat dari konteks dimana kegiatan telaahan dilakukan akan melengkapi dan memverifikasi data yang dikumpulkan secara sistematis. Untuk menjaga validitas data, maka dalam pengumpulan data tersebut dipergunakan berbagai teknik pengumpulan data yaitu sebagai berikut: Wawancara, observasi

PEMBAHASAN

a. Faktor Internal

1. Sejauhmana kemampuan aparatur pemerintah daerah dalam mengelola pariwisata

Kebijakan pembangunan dewasa terutama dalam bidang pariwisata saat ini diarahkan untuk mengembalikan hak-hak dasar masyarakat dengan menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dari berbagai pembangunan. Sedangkan pemerintah, berperan sebagai fasilitator tujuannya agar masyarakat dapat menikmati semua fasilitas yang disediakan pemerintah. Dalam Rapat koordinasi yang dilakukan Pemerintah Kota Kupang Selasa, 23 Juli 2019 dengan tema membangun pariwisata yang kondusif, poin utamanya diharapkan adanya upaya-upaya pengembangan usaha jasa dibidang kepariwisataan di Kota Kupang diarahkan untuk mewujudkan Kota Kupang sebagai kota wisata yang berkualitas dan berdaya saing.

Pemerintah Kota Kupang saat ini dalam tahap mengevaluasi terkait pengelolaan pariwisata yang selama ini belum berjalan dengan efektif, oleh karena Pemerintah dalam hal ini Dinas Pariwisata perlu menetapkan strategi ataupun program yang dimaksudkan untuk melihat faktor apa saja yang menjadi penghambat kunjungan wisatawan di Kupang tidak mengalami pertumbuhan. Bahkan lemahnya pengelolaan pariwisata terletak pada SDM pegawai negeri yang sangat terbatas sehingga tidak mampu mengelola setiap potensi dengan baik pada akhirnya banyak masyarakat yang mengeluh terhadap kinerja dinas pariwisata kota kupang yang sangat rendah. Hal ini diungkapkan oleh beberapa masyarakat yang sering berkunjung di beberapa tempat wisata yang mana mereka menilai pemerintah tidak serius dan tidak

punya visi maupun program yang jelas dalam mengelola pariwisata akibatnya semua tempat pariwisata di Kota Kupang tidak mencerminkan pariwisata yang layak di kunjungi.

Minimnya fasilitas yang mendukung pariwisata seperti tempat duduk yang rusak, kantin yang hanya menyediakan makanan sampai toilet yang rusak selain itu suatu kondisi yang menjadi tantangan Dinas Pariwisata adalah menindaklanjuti berbagai keluhan masyarakat yang merasa tidak nyaman berada di sekitar pesisir pantai yang hampir semuanya di huni reptil buaya yang keberadaannya sangat meresahkan masyarakat ketika berada di sepanjang pantai kota kupang.

Keberadaan SDM berperan penting dalam pengembangan pariwisata. SDM pariwisata mencakup wisatawan/pelaku wisata (*tourist*) atau sebagai pekerja (*employment*). Peran SDM sebagai pekerja dapat berupa SDM di lembaga pemerintah, SDM yang bertindak sebagai pengusaha (*wirausaha*) yang berperan dalam menentukan kepuasan dan kualitas para pekerja, para pakar dan profesional yang turut berperan dalam mengamati, mengendalikan dan meningkatkan kualitas kepariwisataan serta yang tidak kalah pentingnya masyarakat di sekitar kawasan wisata yang bukan termasuk ke dalam kategori di atas, namun turut menentukan kenyamanan, kepuasan para wisatawan yang berkunjung ke kawasan tersebut.

Dengan merujuk pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, pengertian SDM dapat terkait dengan pariwisata adalah “berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha,

pemerintah, dan pemerintah daerah.” Sedangkan yang dimaksud dengan Kepariwisata adalah “seluruh kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antar wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah daerah, dan pengusaha”. Sedangkan industri pariwisata adalah “kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.

Pariwisata sebagai sebuah industri yang sangat bergantung pada keberadaan manusia. Terwujudnya pariwisata merupakan interaksi dari manusia yang melakukan wisata yang berperan sebagai konsumen yaitu pihak-pihak yang melakukan perjalanan wisata/wisatawan dan manusia sebagai produsen yaitu pihak-pihak yang menawarkan produk dan jasa wisata. Sehingga aspek manusia salah satunya berperan sebagai motor penggerak bagi kelangsungan industri pariwisata di suatu negara.

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang berperan penting dalam memajukan sektor pariwisata. Pentingnya SDM di sektor pariwisata adalah manusia (*people*) merupakan sumber daya yang sangat penting di sebagian besar organisasi. Khususnya di organisasi berbasis jasa (*service-based organization*), SDM berperan sebagai faktor kunci dalam mewujudkan keberhasilan kinerja (Evans, Campbell, & Stonehouse, 2003). Pada beberapa industri, faktor manusia berperan penting dan menjadi faktor kunci sukses terhadap pencapaian kinerja. Seperti pada industri pariwisata, di mana perusahaan

memiliki hubungan langsung yang bersifat *intangible* (*tak berwujud*) dengan konsumen yang sangat bergantung pada kemampuan individu karyawan dalam membangkitkan minat dan menciptakan kesenangan serta kenyamanan kepada para konsumennya.

2. Peluang pengembangan pariwisata terhadap peningkatan PAD Kota Kupang.

Sektor pariwisata Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, menyumbang penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 35 persen atau Rp 50 miliar dari total PAD tahun 2017 sebesar Rp165 miliar. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Kota Kupang sangat tinggi sebesar 35 persen dari target PAD. Sektor pariwisata memiliki prospek yang sangat menjanjikan bagi pemasukan daerah ini,” kata Kepala Bidang Industri Pariwisata, Dinas Pariwisata Kota Kupang, Drs Eustakhius Matheus di Kupang, Jumat (18/5/2018). Ia mengatakan, minimnya destinasi wisata alam dimiliki daerah ini sehingga mendorong pemerintah lebih berkonsentrasi menggenjot sektor pembangunan pariwisata jasa seperti bidang akomodasi dan jasa penyediaan makan minum serta hiburan dan rekreasi.

Menurut Abed Frans Ketua Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (*Association of the Indonesia Tours and Travel Agencies*) Propinsi NTT menurutnya perbaikan akses maupun pariwisata serta manajemen dari Dinas Pariwisata itu sendiri. Memang klise jika berbicara mengenai aksesibilitas ataupun pembangunan serta penataan pariwisata. Akan lebih mudah berbicara mengenai manajemen Biasanya yang sering kita dengar adalah Minimnya Anggaran serta Sumber daya sebagai alasan dari lambatnya pembangunan aksesibilitas dan penataan pariwisata tersebut. Tetapi apapun alasannya hal itu adalah wajib hukumnya untuk

diupayakan. Karena produktivitas akan semakin meningkat manakala aksesibilitasnya semakin baik pula. Juga, untuk meningkatkan PAD suatu daerah tentunya perlu diusahakan dari sektor-sektor yang memiliki peluang terbesar untuk meningkatkan PAD itu sendiri dengan waktu yang paling cepat pula. Sektor Pariwisata sudah ditetapkan oleh bapak Presiden Jokowi sebagai sektor prioritas karena merupakan sektor yang paling murah dalam pembiayaan dan paling besar dalam memasukan pendapatan. Oleh sebab itu apapun alasannya maka infrastruktur di bidang Pariwisata wajib dikerjakan dahulu. Kita percaya dan mendoakan agar para pemimpin daerah baik itu Walikota maupun para Bupati dengan segala kemampuan dan kecerdikannya pasti mampu melakukan hal tersebut.

Berikutnya adalah mengenai pelaku pariwisata di daerah itu sendiri. Seperti kita ketahui bahwa pelaku pariwisata seperti Tour Operator masih sangat jarang kita temui di Kota Kupang dan sekitarnya. Tour Operator adalah bagian dari bidang usaha jasa perjalanan, khususnya perjalanan wisata. Biasanya dalam melayani wisatawan, Tour Operator tersebut menyiapkan segala sesuatu yang menyangkut keperluan perjalanan para wisatawan tersebut mulai dari tiket pesawat, hotel, restoran, kendaraan, pemandu wisata, sampai pada asuransi perjalanan. Tour Operator ini biasanya menawarkan produk mereka berupa aneka paket-paket perjalanan wisata pada event-event seperti Travel Mart atau Travel Fair maupun di media baik di dalam maupun di luar negeri. Mungkin karena Kota Kupang dan sekitarnya belum menjadi daerah wisata seperti di Bali, Labuan Bajo dan daerah lainnya oleh sebab itu banyak perusahaan Travel Agent konvensional yang masih ogah untuk menambah “menu”

pelayanannya dengan pelayanan dalam bidang Operator Peralanan wisata. Jika kita sadari bahwa bisnis Travel Agent khusus nya yang berkonsentrasi pada bidang ticketing saja sekarang ini sedang dalam tekanan Travel-travel Online seperti Traveloka, Tiket.com, Via, dll maka sebenarnya para pengusaha Travel Agent tersebut sudah harus memikirkan langkah-langkah antisipatif nya.

Bagaimana menyikapi bisnis ticketing yang semakin menurun dan mencari jalan keluar untuk tetap survive. Jika tidak maka bisa diramalkan bahwa perusahaan nya hanya akan bisa bertahan total tanpa bisa berkembang, kecuali memiliki dana yang besar dan orang-orang yang hebat didalamnya untuk bisa bersaing dengan Traveloka dll itu. Nah untuk itu mungkin Tour Operator adalah salah satu solusinya karena bidang kerjanya masih dalam pelayanan perjalanan, dan jika dibandingkan maka tentunya bidang Tour Operator banyak memiliki kelebihan dibanding Travel Agent, seperti pemasukan yang jauh lebih besar, minimnya potensi hutang dari pelanggan, dan yang pasti sangat menyenangkan karena bisa bekerja sekaligus jalan-jalan juga. Dalam hal ini sebenarnya hanya memerlukan niat yang kuat dan kesabaran saja dalam memulai sebagai Tour Operator. Masalah kemampuan dengan sendirinya akan berkembang seiring dengan berjalannya usaha. (Abed Frans Ketua Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (*Association of the Indonesia Tours and Travel Agencies*) Propinsi NTT)

b. Faktor Eksternal

Kolaborasi antara pemerintah dengan swasta dalam pengelolaan pariwisata, lingkungan sekitar yang mendukung. Sinergitas lintas sektoral dalam pengembangan pariwisata di Kota kupang memerlukan peran pemerintah dan pelaku usaha sebagai sektor

pendukung untuk menciptakan pariwisata yang kondusif. Menurut Persada (2016) seringkali pembangunan pariwisata daerah belum berbasis rencana jangka panjang, masih sangat tergantung kebijakan politik 'sesaat'sesuai selera pimpinan saat itu. Dokumen perencanaan pembangunan bidang pariwisata seperti: RIPPPDA/Perda Pariwisata belum dijadikan acuan utama dalam pembangunan pariwisata daerah. Berbagai kendala seperti kualitas dokumen perencanaan yang rendah serta lemahnya komitmen *stakeholders* terkait dalam membangun kesepakatan bersama. Hal ini menyebabkan berbagai kebijakan pembangunan daerah di bidang pariwisata masih lemah, seperti: lemahnya koordinasi antar sektor, tidak jaminan bagi swasta atau investor tentang arah pembangunan pariwisata daerah dan sebagainya. Bentuk/pola dan mekanisme pengelolaan destinasi pariwisata masih parsial, belum melibatkan banyak pihak, sehingga tidak mendukung karakter pariwisata yang unik yaitu multi dimensional.

Pembangunan kepariwisataan menyangkut banyak pihak dalam pemerintahan maupun sektor swasta. Selain organisasi kepariwisataan pemerintah dan swasta sekarang yang bersifat horisontal dan vertikal, juga diperlukan organisasi kepariwisataan yang bersifat horisontal dan vertikal, juga diperlukan organisasi kepariwisataan yang bersifat diagonal. Di lingkungan pengusaha, diperlukan organisasi yang mencakup berbagai jenis usaha. Organisasi lain yang diperlukan adalah organisasi kemasyarakatan yang dapat menjadi ujung tombak untuk mengefektifkan upaya pemberdayaan dan juga berfungsi sebagai pengendali sosial. Sampai dengan saat ini belum ada upaya pemerintah Kota Kupang untuk

berkolaborasi atau menggandeng pihak swasta dalam pengelolaan pariwisata laut hal ini dibuktikan dengan tidak adanya regulasi yang mendorong keterlibatan pihak swasta. Jika dibandingkan dengan beberapa kota besar di Jawa, Bali sudah ada upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah setempat untuk memberikan kesempatan kepada pihak swasta untuk mengelola berbagai potensi daerah wisata. Kesempatan diberikan kepada swasta dalam mengelola pariwisata ternyata lebih berkembang daripada dikelola pemerintah hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya perbaikan-perbaikan fasilitas-fasilitas dan sarana prasarana yang memadai sehingga dapat memberikan rasa nyaman bagi pengunjung. Hal di atas tentunya belum dilakukan oleh pemerintah Kota Kupang sehingga ini menjadi faktor yang menjadi penghambat pariwisata di Kota Kupang tidak berkembang dengan baik

Faktor eksternal lainnya yang menghambat pariwisata juga terletak pada promosi dan sistem pengelolaan informasi pariwisata yang belum efektif sehingga objek wisata dengan industri-industri jasa pendukungnya kurang dikenal bahkan kurang dapat menarik perhatian wisatawan untuk datang ke kota kupang. Kurangnya promosi dari Dinas Pariwisata Kota Kupang selama ini menjadi tantangan tersendiri dalam hal pariwisata wisatawan lebih banyak mengenal Pulau Komodo dibandingkan dengan wisata yang ada di Kota Kupang.

Persada (2016) Di lingkungan pemerintahan, kelembagaan yang berbentuk Dinas Pariwisata masih sulit mengembangkan pariwisata daerah, apalagi kelembagaan yang mempunyai nomenklatur yang panjang (Dinas A,B,C,dan Pariwisata). Di samping itu untuk organisasi yang berbentuk badan atau kantor juga masih memiliki kewenangan

terbatas. Kelembagaan di pemerintahan ini juga sangat tergantung siapa yang ada di belakangnya (*manbehindthegun*), oleh sebab itu peran Kepala Dinas Pariwisata sangat berpengaruh dalam menggerakkan pariwisata tingkatan satuan kerja. Di masa yang akan datang mungkin juga perlu ada semacam "sertifikat" kepala Dinas Pariwisata artinya kalau pariwisata akan menjadi sektor yang dipilih atau diinginkan pengembangannya, maka dianggap krusial untuk menyiapkan seorang Kepala Dinas Pariwisata untuk dibekali dengan pemahaman kepariwisataan yang mendasar.

Perhatian pengembangan kepariwisataan selama ini terfokus pada pengembangan sektor-persektor- industri/swasta, pemerintah, masyarakat - dan perkomponen produk pariwisata, pelayanan pendukung, dan lain-lain. Padahal untuk menyediakan kualitas pengalaman yang terbaik dan menciptakan nilai yang tinggi bagi pengunjung, pengembangan sektor-sektor dan komponen-komponen tersebut harus bersinergi dalam satu rangkaian di sebuah destinasi, jadi tidak dapat berdiri sendiri (Wiyonoputri, 2008).

Siapa saja yang akan berkolaborasi? Ada 5 kelompok kunci yang dapat berkolaborasi yaitu: *Akademisi, Businessman, Community, Government* dan *Media* atau dikenal dengan 5 PILAR (ABCGM). Dalam pariwisata masing-masing stakeholder ini mempunyai peran yang berbeda, walaupun mungkin dalam beberapa hal ada yang bersinggungan.

1. Pemerintah berperan menyiapkan prasarana dan sarana dasar yang mendukung pengembangan pariwisata, menyiapkan berbagai peraturan berkaitan dengan pariwisata, memfasilitasi kemudahan berwisata dan

berusaha melakukan kegiatan promosi dan pemasaran destinasi. Peran Pemerintah Daerah dalam pengembangan destinasi adalah sebagai: regulator, fasilitator, mediator dan penyedia prasarana. Pengembangan destinasi maupun pengembangan industri memerlukan regulasi yang jelas dan bijak serta kelembagaan yang padu baik dari pihak swasta maupun pemerintah. Dalam ketergantungan tersebut dapat diidentifikasi pembagian peran atau siapa melakukan apa. Pengembangan industri atau usaha pariwisata tentunya dilakukan oleh swasta dan pemerintah berfungsi memfasilitasi dan mendukungnya. Pemerintah Provinsi bersama Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota bertugas mengembangkan masyarakat dan berbagai macam pelayanan publik yang diperlukan agar pariwisata dapat terselenggara di tempat tersebut dan industri kepariwisataannya dapat berkembang. Selain itu pemerintah berperan langsung dalam pengembangan regulasi untuk mengatur, mengendalikan kegiatan pengembang dan industri, serta memperkuat kelembagaan untuk peningkatan kapasitas dalam merumuskan kebijakan dan pengambilan keputusan di berbagai tingkatan pemerintahan

2. *Business* (swasta/dunia usaha) berperan sebagai penyelenggara bisnis pariwisata sesuai etika bisnis, profesional, bertanggung jawab dan berkelanjutan. Peran dunia usaha sebagai lembaga yang "*profit oriented*" juga harus ikut bertanggung jawab dalam keberlanjutan lingkungan sebagai modal utama pariwisata. Kemitraan swasta dengan

masyarakat dan pemerintah sangat diperlukan dalam arti yang “sebenarnya”. Hubungan yang saling menguntungkan (*win-win*) harus dibangun dengan pola-pola pendekatan yang formal maupun non formal. Beberapa destinasi pariwisata yang berhasil melibatkan banyak pihak, salah satu karena membangun pendekatan nonformal antara swasta dan pemerintah.

3. *Community* di dalamnya masyarakat dan komunitas-komunitas (NGO/LSM) ; masyarakat berperan mendukung sapta pesona/ darwisplus dan menyediakan jasa pariwisata/ekonomi kreatif. Masyarakat adalah obyek dan subyek dari pariwisata itu sendiri, tapi di sisi lain masyarakat bisa menjadi kendala pengembangan pariwisata di suatu destinasi. Oleh sebab itu masyarakat harus tahu persis apa peran mereka dan pariwisata adalah untuk kesejahteraan mereka juga. Pendampingan terus menerus dari pemerintah, LSM dan swasta dapat meningkatkan peran masyarakat dalam pengembangan pariwisata daerah.
4. Akademisi berperan melakukan berbagai riset dan pengabdian masyarakat berkaitan pengembangan pariwisata, agar pembangunan pariwisata berbasis penelitian. Seringkali peran hasil penelitian tidak dimanfaatkan dalam pengembangan pariwisata. Berbagai pengabdian masyarakat dapat dilakukan akademisi dalam pengembangan pariwisata, untuk itu diperlukan komunikasi dan kerjasama dengan akademisi dalam pengembangan pariwisata.

5. Media terutama media *online* saat ini menjadi kekuatan informasi dan andalan dalam promosi pariwisata. Promosi dan pemasaran pariwisata sekarang dapat dilakukan dengan cepat dengan memanfaatkan media sosial. Promosi sekarang lebih bersifat *inklusif*, contoh: wisatawan dapat menunggah testimony berkunjung ke suatu obyek wisata di media sosial.

PENUTUP

Sektor Pariwisata menjadi sumber pemasukan yang signifikan bagi daerah oleh karena itu pemerintah daerah Kota Kupang melalui Dinas Pariwisata harus mampu mengelola pariwisata dengan baik dengan prioritas membenahi semua kekurangan baik dari SDM pegawai sendiri yang dirasakan masih sangat terbatas, selain itu sarana prasarana yang sangat terbatas dan minim sehingga mempengaruhi kunjungan wisata baik domestik maupun wisatawan lokal, Dalam mencapai tujuan pengembangan pariwisata yang optimal, maka perlu adanya partisipasi atau juga kolaborasi dari pelaku swasta dengan pemerintah dalam pengembangan industri pariwisata di Pantai Lasiana, Pantai Manikin dan beberapa wisata laut lainnya. Partisipasi dalam penyediaan fasilitas pendukung pariwisata misalnya, tempat penginapan, restoran, tempat hiburan, biro perjalanan wisata dan *tour operator*, serta penyediaan sarana aktivitas olahraga air (*water sport*). Harapan di atas jika benar-benar dapat di sediakan dan di fasilitasi oleh pemerintah daerah maka pariwisata di Kota Kupang dengan sendirinya dapat berkembang dan dapat memberikan pemasukan bagi pendapatan asli daerah.

DAFTAR RUJUKAN

- Alister Mathieson and Geoffrey Wall. 1982. *Tourism: Economic, Physical and Social Impact*. New York. Longman Scientific and Technical
- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. CV. Alfabeta: Jakarta.
- Badrudin, Rudi, 2001, *Menggali Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Daerah Istimewa Yogyakarta Melalui Pembangunan Industri Pariwisata*, Kompak: Yogyakarta.
- Bimo Walgito. (2004). *Pengantar psikologi Umum*. Jakarta: Penerbit Andi
- Creswell, John W. 2010. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Gaspersz, Vincent. *Manajemen Bisnis Total dalam Era Globalisasi*. Jakarta : Penerbit PT. Gramedia, 1997.
- Haris JM dan Godwin. 2002. *A Survey of Sustainable Development: Social and Economic Dimensions*. The Global Development and Environment Institute Tufts University.
- Ismayanti. *Pengantar Pariwisata*. Jakarta: Grasindo.
- Irwan, Pabiban 2013. *Kajian Obyek Wisata Kota Kupang Berdasarkan Data Penginderaan Jauh Dan Sistem Informasi Geografis*. Jurnal Eltek. Vol 11. No 2, Oktober ISSN. 1693-4024.
- Jalaludin, Rakhmat. 2007. *Persepsi Dalam Proses Belajar Mengajar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Marpaung, Happy. 2002. *Pengantar Pariwisata*. Bandung : Alfabeta.
- Mathieson, Alister dan Wall, Geoffrey, (1982), *Tourism: Economic, physical, and social impacts*, Longman (London and New York)
- Thoha, Miftah, 2013, *Kepemimpinan dalam manajemen*, edisi 1, PT Raja Grafindo, Jakarta
- Oka A. Yoeti. 2008. *Ekonomi Pariwisata: Introduksi, Informasi, dan Implementasi*. Penerbit Kompas. Jakarta
- Pareek, Udai. 1984. *Perilaku Organisasi*. Jakarta : PT. Pustaka Binaman Pressindo.
- Paturusi, Samsul A, 2001, *Perencanaan Tata Ruang Kawasan Pariwisata, Materi Kuliah Perencanaan Kawasan Pariwisata*, Program Pasca Sarjana Universitas Udayana Denpasar, Bali.
- Sugihartono, dkk, 2007. *Psikologi Pendidikan*. Yogyakarta: UNY Pers.
- Suharman. 2005. *Psikologi Kognitif*. Surabaya: Srikandi.

Wahab, Salah. 1976. *Pemasaran Pariwisata*. Terjemahan oleh Frans Gromang. 1992. Jakarta: Pradnya Paramita.

Waidi. (2006). *The Art of Re-engineering Your Mind for Success*. Jakarta: Gramedia.

Winarno, Budi. 2002. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Media Presindo: Yogyakarta

Pendit, N.S, 1999, *Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana*, Penerbit, PT. Anem Kosong Anem

Nyoman.S.Pendit. 2002. *Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana*. Jakarta: Pradya Paramita